

OTONOMI PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN SUMBERDAYA SEKOLAH

Nursofah¹, Rugaiyah², Madhakomala³

¹²³Jakarta State University, Jakarta, Indonesia

*dulhadinursofah21@gmail.com¹ *rugaiyah@unj.ac.id² *madhakomala@unj.ac.id³

ABSTRACT

The low quality of educational resources has caused a shift in the national education system. The education system which was initially centralized in which schools were placed as education providers was very dependent on the decisions of the central government bureaucracy which sometimes the results of the decisions were not in accordance with the school's resources which in the end caused the school to not have the initiative and creativity of the school to lose independence, changing to a decentralized education system. , educational autonomy gives authority to schools to participate in decision-making to improve the quality of education by managing and empowering available resources, to empower schools as the spearhead of educational autonomy thereby increasing school resources. The formulation of the problem of this research is how educational autonomy efforts in increasing school resources. The purpose of this research is to see how educational autonomy efforts improve school resources. The results of research related to educational autonomy efforts to increase school resources are non-human resources. because they realize that between one region and another region has different resource capabilities. In addition to increasing human resources, training and coaching activities are needed to support increasing the competence of educators and education staff in schools, especially training and coaching related to the learning process, then physical resources. Thus, the school community will form good cooperation to help the school in dealing with school problems.

Keywords: Otonomy, Education, Resource

ABSTRAK

Rendahnya kualitas sumber daya pendidikan telah menyebabkan pergeseran sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang awalnya sentralistik dimana menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung kepada keputusan birokrasi pemerintah pusat yang kadang hasil putusannya tidak sesuai dengan sumber daya sekolah tersebut yang pada akhirnya menyebabkan sekolah tidak memiliki inisiatif dan kreativitas sekolah menjadi kehilangan kemandirian, berganti menjadi sistem pendidikan yang disentralistik, otonomi pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, untuk memberdayakan sekolah sebagai ujung tombak otonomi pendidikan dengan demikian akan meningkatkan sumber daya sekolah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah.. Hasil penelitian terkait upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah adalah sumber daya bukan manusia otonomi pendidikan memberikan kebebasan pada sekolah untuk mengembangkan, memperdalam, memperkaya kurikulum muatan lokal, karena menyadari bahwa antara satu daerah dengan daerah lain memiliki kemampuan sumber daya yang berbeda. Selain itu untuk peningkatan sumber daya manusia maka diperlukan kegiatan pelatihan dan pembinaan dalam menunjang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya pelatihan dan pembinaan terkait proses pembelajaran, selanjutnya sumber daya fisik, dalam penyusunan perencanaan akan lebih baik jika dilakukan melalui rapat yang melibatkan seluruh warga sekolah dengan demikian akan terbentuknya kerja sama yang baik membantu sekolah dalam menangani permasalahan sekolah.

Keyword: Otonomi, Pendidikan, Sumber Daya

Submitted	Accepted	Published
March 07 th 2023	March 17 th 2023	March 25 th 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mendasar dalam perubahan laju suatu bangsa, karena masa depan dan keunggulan bangsa ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia yang dimilikinya. Disamping sumber daya alam dan modal, (Sholihah & Firdaus, 2019). Sumber daya manusia yang tinggi diharapkan secara signifikan dapat menjadi subjek pembangunan untuk lebih berhasil mengelola sumber daya sekolah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berbicara tentang kualitas sumber daya, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu meningkatkan sumber daya pendidikan menjadi hal utama dalam otonomi pendidikan.

Penyebab rendahnya sumber daya sekolah yaitu: Pertama, kebijakan penyelenggara pendidikan lebih menekankan pada hasil bukan pada proses, padahal yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah proses pendidikan itu sendiri. Kedua, penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sentralistik, sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung dengan keputusan birokrasi. Pemusatan komando telah mengakibatkan para guru dan pengelola sekolah mengikuti petunjuk yang telah dibakukan selain itu kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif, (Michael, 2021). Akibatnya, kreativitas guru dan pengelola sekolah sangat rendah untuk mengembangkan dan memajukan lembaga termasuk meningkatkan mutu dan sumber daya pendidikan sebagai tujuan pendidikan nasional, karena dibatasi oleh rambu-rambu seperti kurikulum, juklak, juknis, dan lainnya (Amelia Rahmi, 2001). Artinya, segala sesuatunya telah ditentukan secara sentral, dan sekolah tinggal melaksanakan. Cara seperti ini mengakibatkan kreatifitas menjadi rendah yang berakibat menurunnya kualitas output pendidikan yang berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia. Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini lebih banyak bersifat mendukung dana, bukan pada proses pendidikan.

Dari permasalahan tersebut otonomi pendidikan hadir sebagai pendidikan yang disentralis di keluarkannya UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah serta diikuti oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan, (Mugiarto et al, 2022) . Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangan berada pada pemerintah daerah, kota/kabupaten. Menurut Umiarso dan Gojali (2010), Konsep penyelenggaraan pendidikan yang bersifat desentralisasi dikenal dengan manajemen berbasis sekolah yang merupakan perubahan paradigma pengelolaan pendidikan yang semula berpusat pada pemerintah pusat beralih ke pengelolaan pendidikan pada pola manajemen dimana sekolah tersebut yang mengelolanya.

Menurut Danim (2006), kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia baru dimulai sejak tahun 2000, yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah. Dana tersebut disetor langsung ke rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya. Adapun Kementerian Pendidikan Nasional mendeskripsikan bahwa tujuan pelaksanaan MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola serta memberdayakan sumber daya yang ada dan tersedia; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Otonomi pendidikan dengan asas disentralis ini diharapkan dapat melahirkan warga negara yang inovatif, bisa bersaing dan dapat bekerjasama membangun sumber daya masyarakat yang unggul. Diberlakukannya otonomi pendidikan memberikan angin segar pada daerah khususnya sekolah untuk dapat

mengembangkan potensinya. Sekolah dapat dengan leluasa membuat rencana-rencana yang sesuai dengan kondisinya sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya sekolah tentunya dengan rencana yang matang, pelaksanaan yang profesional, serta koordinasi kerja yang baik dengan tujuan utama memenuhi harapan masyarakat. Untuk terlaksananya otonomi pendidikan yang sesuai dengan tujuan dalam hal ini para pengelola pendidikan pada tingkat daerah diharapkan untuk melakukan identifikasi terkait adanya faktor kelebihan dan kekurangan dari potensi daerah tersebut. Sehingga dapat melihat peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Identifikasi dalam proses otonomi pendidikan menjadi kunci utama. Oleh sebab itu diperlukan kreativitas dan kemandirian sebagai kata kunci untuk maju.

Kualitas pendidikan pada otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah, (Ismail, 2018; Rosyada, 2017). Hal ini disebabkan pemerintah Pusat secara administrasi telah menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan pendidikan di daerahnya. Ketika pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju, (Haba, 2018 & Ismail, 2020). Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang *well educated*, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang.

Sehingga dalam hal ini otonomi pendidikan, menuntut pemerintah daerah untuk mulai merancang sebuah pola pembangunan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Hal ini sangat beralasan, karena pendidikan merupakan bagian dari *public service* kewenangannya diserahkan kepada daerah, begitu urusan pendidikan diserahkan kepada daerah berarti sebagian besar pendanaan pendidikan tanggungjawab daerah. Masalah ini menjadi masalah besar apabila pemerintah daerah tidak menaruh perhatian yang proposional terhadap pendidikan karena sesungguhnya pendidikan adalah investasi daerah yang pada masa mendatang akan menghasilkan *return* bagi suksesnya pembangunan ekonomi daerah. Sejalan dengan penjelasan di atas, persoalan mendasar dalam desentralisasi pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, serta mengapa demikian. Apabila penguasaan ini jelas, maka pengurusan pendidikan yang desentralistis tersebut akan terlaksana dengan baik.

Penyelenggara pendidikan juga harus mampu menjawab permasalahan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bertumpu pada kondisi daerah. Tuntutan akan kemampuan untuk dapat mengelola potensi lingkungan daerah menjadi suatu keniscayaan. Otonomi pendidikan yang dialami tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi, mutu pendidikan, dan perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, (Mukhlis & Siahaan, 2022). Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi pendidikan tidak saja tentang mempersiapkan sumber daya manusia terbatas untuk kepentingan daerah, tapi juga untuk kepentingan nasional.

Untuk mencapai keberhasilan otonomi pendidikan sekurang-kurangnya ada lima komponen yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya proses pendidikan tersebut. *Pertama*, tujuan atau visi pendidikan nasional di daerah, harus dibuat rumusan yang jelas. *Kedua*, organisasi dan manajemen yang efisien. *Ketiga*, kurikulum yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat lokal. *Keempat*, kemampuan para pelaku (guru, administrator, siswa). *Kelima*, para stakeholder (orang tua dan masyarakat). (Amelia Rahmi, 2001). Kemandirian pimpinan lembaga pendidikan semakin dituntut dalam era otonomi pendidikan. Sekolah harus lebih mandiri dan mengembangkan semua sumber daya sekolah. Sekolah harus mampu membuat kebijakan atau rencana-rencana yang akan membawa perubahan yang lebih baik bagi sekolah.

Penelitian sebelumnya terkait otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan merupakan angin segar dalam rangka untuk memberikan dan menjadikan mutu pendidikan lebih baik, (Mubin, 2022). Otonomi satuan pendidikan adalah alternatif memberikan kemandirian pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi masih tetap mengacu pada kebijakan nasional, (Cahyana, 2010). Manajemen berbasis sekolah perlu dilaksanakan karena sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolahnya, (Yanti, 2022).

Otonomi daerah telah memberikan kebebasan yang luas bagi madrasah dalam memanfaatkan manajemen berbasis sekolah (MBS), pendelegasian wewenang, termasuk kesempatan dalam melakukan inovasi pendidikan, (Aini, M, 2022). Semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah yang berkualitas, (Lestari et al, 2022). Otonomi daerah dalam bidang pendidikan bisa menjadikan pendidikan lebih berkualitas, (Sampaleng, 2023)

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat otonomi pendidikan mampu menjadikan sekolah lebih mandiri, memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal secara maksimal, serta lebih peka terhadap kebutuhan daerah. Meskipun dalam analisis tentu belum semua daerah merasakan dampak secara keseluruhan dari otonomi pendidikan tersebut, tetapi dalam hal ini semua sepakat bahwa otonomi pendidikan menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan

Pada otonomi daerah pengembangan sumber daya sekolah menjadi tujuan utama. Diharapkan sekolah terus meningkatkan sumber dayanya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya di sekolah dapat dikelompokkan menjadi (a) sumber daya bukan manusia, yang meliputi program sekolah, kurikulum, (b) sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah, (c) sumber daya fisik yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah, dan sumber daya keuangan yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka diambil rumusan masalah bagaimana upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menemukan fakta terkait upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah. Manfaat penelitian ini adalah untuk menjadi bahan kajian dan perbaikan terkait upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah agar dalam prosesnya akan jauh lebih baik dan sesuai dengan yang di cita-citakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu menganalisis atau mengkaji lebih dalam suatu konsep atau fenomena sosial yang memiliki sifat kasus. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian library research. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan sumber referensi yang terkait terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya melakukan review terhadap sumber terkait lalu mengkaji atau menginterpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan tersebut berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, dan jurnal artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi pendidikan adalah desentralisasi pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas pendidikan pada lembaga sekolah, dimana lembaga sekolah memiliki kebebasan dan kemandirian untuk mengatur lembaga sekolahnya sendiri. Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah dalam bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan local, (Rosyid & Ali, 2022). Kemandirian dengan pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola penyelenggara pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian ini diwujudkan antara lain dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh

pemerintah daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan.

Implementasi otonomi pendidikan mutlak diberikan untuk mengambil keputusan-keputusan konkrit dalam mengelola sekolah dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa urusan yang secara langsung dapat diserahkan pihak sekolah sebagai perwujudan dari otonomi pendidikan sebagai berikut: Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah; Memiliki kewenangan dalam penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki; Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah; Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada; Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten; Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah; Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep otonomi pendidikan merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

Oleh karena itu dihadapkannya otonomi pendidikan diharapkan setiap daerah bisa memanfaatkan dan memberdayakan potensinya masing-masing. Adapun upaya otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Bukan Manusia

Sumber daya bukan manusia meliputi program sekolah, kurikulum. Kurikulum yang dibuat Pemerintah Pusat adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional. Padahal jika dilihat kondisi setiap sekolah sangat beragam. Oleh karena itu dengan hadirnya otonomi pendidikan memberikan kebebasan pada masing-masing sekolah untuk mengembangkan, memperdalam, memperkaya dan memodifikasi. Namun dalam hal ini sekolah tetap tidak mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional, (Kurniawan. et al, 2022). Otonomi pendidikan memperbolehkan sekolah memperdalam kurikulum, artinya muatan kurikulum boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi. Sekolah juga diperbolehkan memperkaya yang diajarkan, artinya apa yang diajarkan boleh diperluas dari yang seharusnya. Demikian sekolah dibolehkan mengadakan modifikasi kurikulum, artinya yang diajarkan boleh dikembangkan agar lebih kontekstual dan selaras dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah. Pengembangan kurikulum tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat, tetapi merupakan *share activity* dengan pemerintah daerah, bahkan masyarakat. Pemerintah cukup menangani kurikulum yang sifatnya inti. Sedangkan kurikulum yang sifatnya muatan lokal disusun dan dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan, (Yuliyani, 2020). Tidak hanya dalam pengelolaan kurikulum, sekolah juga mendapatkan wewenang dalam pengelolaan: 1) proses belajar mengajar; 2) perencanaan dan evaluasi program sekolah; 3) pengelolaan kurikulum; 4) pengelolaan ketenagaan; 5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan; 6) pengelolaan keuangan; 7) pelayanan peserta didik; 8) hubungan sekolah masyarakat; dan 9) pengelolaan iklim sekolah, (Supena. et al, 2022).

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, memiliki karakter dan kematangan emosional. Sehingga dalam hal ini dalam pengembangan kurikulum harus memenuhi kebutuhan siswa, menyajikan kurikulum secara efektif dan efisien dengan

memperhatikan sumber daya yang ada, serta mengembangkan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alami di sekolah.

Sekolah diperbolehkan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal. Menyadari bahwa antara satu daerah dengan daerah lain memiliki kemampuan alam yang berbeda. Demikian juga sumber daya manusia yang dimilikinya. Rendahnya tingkat produksi daerah disertai kualitas sumber daya manusia yang kurang mendukung untuk pengembangan, akan sangat mempengaruhi laju pembangunan yang dilakukan, sehingga perlu ada upaya lain yang dapat mengangkat keterbatasan tersebut menjadi peluang pemberdayaan. Untuk memenuhi harapan tersebut upaya mengembangkan potensi khusus suatu daerah menjadi bahan masukan yang sangat penting untuk memunculkan spesialisasi produk andalan. Produk andalan akan banyak memberikan sumbangan berarti bagi perolehan pendapatan asli daerah yang gilirannya akan membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Disisi karena keterbatasan daya dukung baik bahan baku, permodalan maupun keterampilan sumber daya manusianya akan mendorong daerah berkompetisi dengan daerah lain dalam menjamin hubungan kerja sama, selain itu sebagai bekal pengembangan potensi daerahnya, mewujudkan budaya bangsa dan memperkuat kemandirian nasional, menumbuhkan kemampuan nasional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, meningkatkan mutu hidup dan lingkungan masyarakatnya, serta menumbuhkan perjuangan bangsa dan pembangunan nasional.

2. Sumber Daya Manusia

Pada otonomi pendidikan sekolah dituntut untuk meningkatkan sumber daya manusia pada masing-masing sekolah. Sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Strategi dalam meningkatkan sumber daya sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi lembaga, banyak daerah yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kelebihan pengelolaan lembaga pendidikan yang dimiliki daerah. Hal lain yang sering menjadi keunggulan sebuah lembaga pendidikan adalah budaya sekolah yang diciptakan. Budaya sekolah merupakan faktor penting bagi pendidikan karakter siswa.

Potensi sumberdaya manusia meliputi kepemimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu tantangan pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah adalah bagaimana melahirkan kepemimpinan baru, (Ramadhan, 2019). Di samping itu, daerah diberi kekuasaan untuk mengelola potensi tenaga pendidikan dan kependidikan di daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia kaya akan kearifan lokal dengan berbagai bentuk dan variasinya. Otonomi daerah di bidang pendidikan memberikan kesempatan bagi para pemangku otoritas untuk memanfaatkan berbagai kearifan lokal tersebut, melestarikan, bahkan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan.

Dengan dilakukannya otonomi pendidikan, sekolah harus lebih mandiri dalam mengelola sumber daya manusia. Sekolah mewajibkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan pusat, dinas pendidikan provinsi ataupun oleh masing-masing sekolah, (Meilani, Lubis & Darwin, 2022). Hal ini terbukti dengan sering diikutkannya tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan yang menunjang kegiatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pelatihan dan pembinaan dalam proses pembelajaran. Sehingga sekolah harus sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada peningkatan kompetensi diantaranya sebagai berikut:

- a. Dalam proses seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah mulai menitik beratkan kepada kualifikasi pendidikan para pendidik dan tenaga kependidikan dilembaganya. Untuk itu sekolah harus memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang

profesional dengan jumlah yang memadai dengan kualifikasi, kompetensi dan tingkat kesesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

- b. Sebagai alternatif pemecahan terkait kompetensi guru, sekolah mengirim guru-guru secara bergiliran untuk mengikuti pelatihan pada lembaga yang dianggap potensial dan berpengalaman dengan tujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan guru, baik dalam bidang keahlian ataupun substansi metode pengajaran maupun terkait berbagai pola evaluasi.
- c. Mengikutkan para pendidik dan tenaga pendidikan dalam berbagai program dan pelatihan yang diselenggarakan baik instansi pemerintah pendidikan atau lintas departemen yang masih berkenaan dengan kemajuan sekolah. Biasanya kerjasama dilakukan pada waktu tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- d. Memberikan kesempatan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk izin belajar ataupun tugas belajar, tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah.
- e. Mengundang pakar pendidikan untuk melatih dan membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang didatangkan langsung dari departemen pendidikan wilayah atau provinsi maupun dari departemen pendidikan nasional
- f. Kepala sekolah memberikan izin kepada guru untuk melakukan penyetaraan pendidikan bagi yang belum memenuhi kualifikasi, kompetensi dan tingkat kesesuaian akademik berdasarkan pada peraturan yang berlaku.

Selain itu otonomi pendidikan dalam meningkatkan sumber daya sekolah, guru dalam hal ini dituntut untuk banyak membaca buku baik terkait dengan bahan ajarnya maupun terkait informasi yang aktual; guru juga dituntut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pihak sekolah baik mengenai kurikulum, metode pembelajaran, dan sebagainya terkait dengan peningkatan mutu dan sumber daya sekolah; mengikuti studi banding atau kunjungan ke instansi lain untuk berbagi wawasan; mengikuti seminar guru mata pelajaran atau nasional yang diadakan berbagai kalangan terkait pendidikan; mengikuti loka karya yang diadakan pihak sekolah ataupun pemerintah setempat. Itulah upaya-upaya yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi ternyata tidak hanya dari aspek eksternal tetapi juga aspek internal juga karena itu sangat membantu bahkan merupakan modal utama bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya. Sikap terbuka akan menjadikan guru tahu kekurangan dan kelebihan dirinya dengan begitu akan selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan kompetensinya serta sadar akan pentingnya peningkatan tersebut, khususnya terkait proses belajar mengajar tentu akan menghasilkan guru yang berkompeten dan berakhir dengan peningkatan sumber daya sekolah.

Selanjutnya, dengan diterapkannya otonomi pendidikan, maka pihak sekolah harus dapat membangun hubungan yang baik antara pihak sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Esensi hubungan sekolah dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan ketertiban, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial tentunya untuk meningkatkan sumber daya sekolah. dalam hal ini untuk meningkatkan sumber daya sekolah perlu mengadakan kerjasama antara sekolah, orang tua siswa dengan masyarakat sekitar, dengan partisipasi masyarakat maka diharapkan dapat terbentuk suatu kerjasama. Oleh karena itu sekolah harus memperhatikan hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, tentunya dengan menjaga komunikasi yang baik agar masyarakat secara kooperatif turut serta dalam membangun kemajuan sekolah.

3. Sumber Daya Fisik

Sumber daya fisik meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah, dan sumber daya keuangan yang meliputi keseluruhan

dana pengelolaan sekolah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Pada otonomi pendidikan sekolah diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber keuangan sekolah dengan tujuan agar tidak semata-mata bergantung pada pemerintah. Pada otonomi pendidikan pengelolaan keuangan terutama terkait pengalokasian anggaran sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga sampai pada pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolah adalah yang paling memahami dan mengetahui kebutuhan baik terkait fasilitas, kecukupan, kesesuaian maupun kemutakhirannya terutama terkait fasilitas yang berpengaruh langsung dalam proses belajar mengajar.

Keuangan sekolah adalah merupakan hal yang sangat penting, sehingga dalam pengelolaannya harus diserahkan pada orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Perencanaan dan pengelolaan pengadaan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran disusun sesuai dengan tahun ajaran. Yang menghambat keterbatasan otonomi pendidikan adalah sarana prasarana dan keterlibatan masyarakat yang belum maksimal, oleh karena itu penyusunan perencanaan akan lebih baik jika dilakukan melalui rapat yang melibatkan pimpinan, seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua murid, komite sekolah dan tokoh masyarakat baik terkait jadwal kegiatan, sarana prasarana apa yang digunakan dalam proses belajar mengajar, fasilitas gedung sekolah, alat peraga dan sebagainya yang mencakup seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan sekolah. Dengan demikian akan terbentunya kerja sama yang baik membantu sekolah dalam menangani masalah keuangan sekolah.

Pada otonomi pendidikan proses pengadaan sarana prasarana akan lebih baik jika sekolah menyerahkan kegiatan ini sepenuhnya kepada masing-masing guru yang terlibat dalam proses belajar mengajar dengan tujuan agar pengadaan sarana prasarana dapat digunakan secara efisien. Sehingga dalam hal ini kepala sekolah diharapkan secara khusus melakukan pengarahan mengenai penggunaan sarana prasarana dalam proses pembelajaran. Selain itu untuk menjaga sarana prasarana sekolah memberikan arahan bahwa seluruh warga sekolah agar ikut bertanggung jawab memelihara sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa sarana prasarana sekolah adalah tanggung jawab seluruh komponen yang ada di sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Otonomi pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan sumber daya sekolah. Dimana dengan otonomi pendidikan sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya itu sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam penerapan otonomi pendidikan diharapkan memperhatikan faktor-faktor berikut. Sekolah diharapkan selalu mempertahankan atau peningkatan sumber daya sekolah dengan tujuan akhirnya adalah mutu lembaga melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia di sekolah; sekolah harus terus meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama; guru bersama seluruh stakeholder terkait selalu meningkatkan kompetensinya baik dari segi keilmuannya, wawasannya agar dapat membimbing peserta didik dengan baik dan meningkatkan program pembelajaran yang dapat membantu para peserta didik menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, M. (2022). Disentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia.. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Volume 12 Nomor 1. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam

- Cahyana, A. (2010). Upaya Peningkatan Mutu Sekolah Melalui Otonomi Satuan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Volume 16, Nomor 2
- Danim, S. (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Haba, R. (2020). Reformasi Pendidikan dalam Perspektif Pemerintah Daerah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*. Volume 7, Nomor. 1
- Ismail, Ismail, F. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra*. Volume 2, Nomor 2.
- Irjus Indrawan, I. (2018). Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional Melalui Manajemen Berbasis Sekolah. *Journal for Religious Innovation Studies*. Volume 1 Nomor 1
- Kurniawan, R. Riswan. Hilman, C. (2022). Dinamika Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralistik. *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*. Volume 2, Nomor 2. <http://journal.ainarapress.org/index.php/jiepp>
- Lestari, I. Anggaraini, I. Maisyaroh. (2022). Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pendidikan Saat Ini. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Volume 1 Nomor 3. DOI: 10.47709/educendikia.v1i3.1239
- Michael, A. (2021). Analisis Pengaruh Otonomi Pendidikan Terhadap Kualitas Belajar Manasiswa. *Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 5, Nomor 2. P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328
- Meilani. Lubis & Darwin. (2022). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah. *Jurnal Basicedu*. Volume 6 Nomor 3. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2840>
- Mubin, F. (2022). Telaah Kualitatif Atas Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Otonomi Daerah. *Jurnal Andragogi*. Volume 4 Nomor 1. doi.org/10.36671/andragogi.vli3.66
- Mugiarto. Wasliman & Handayani. (2022). Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*. Volume 04, Nomor 01
- Mukhlis & Siahaan, A. (2022). Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan. *Journal Educational Research and Social Studies* Volume 3, Nomor 1. <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>
- Ramdhan. (2019). Model Pengembangan Kurikulum Multikultural. *Jurnal Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 5 Nomor 2
- Rosyid, A. Ali, N. (2022). Latar Belakang dan Visi Otonomi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Andragogi*. Volume 4 Nomor 3. <https://doi.org/10.36671/andragogi.vli3.66>
- Rosyada, D. (2017). *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana
- Sholihah & Firdaus. (2019). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Jurnal Al Himah*. Volume 7
- Sampaleng, D. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Pendidik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Volume 17, Nomor 2. DOI : 10.35931/aq.v17i2.1953. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>
- Sumpena. Nurhamidah, S. Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*. Volume 2, Nomor 2. <http://journal.ainarapress.org/index.php/jiepp>
- Umiarso & Ghozali, I. (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Yanti, D. (2022). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Melalui Manajemen Berbasis Pendidikan. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*. Volume 8, Nomor 1

Yuliyani, N. (2020). Otonomi Pendidikan dan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sebagai Jawaban Atas Realitas Kekinian. *BUNAYYA Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah*. Volume 1. Nomor 1